

ISBN : 978-602-99286-2-4

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL
“PENGEMBANGAN MASYARAKAT
BERBASIS MODAL SOSIAL”



Sabtu, 4 Mei 2013
Ruang Sidang Utama
Rektorat UNY

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Negeri Yogyakarta
Program Pasca Sarjana & Fakultas Ilmu Pendidikan
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah



PROCEEDING

PENGEMBANGAN MASYARAKAT
BERBASIS MODAL SOSIAL

Editor

Prof. Dr. Yoyon Suryono
Dr. Sugito, MA
Dr. Sujarwo, M.Pd
Dr. Iis Prasetyo, MM
Dr. Puji Yanti Fauziah
Lutfi Wibawa, M. Pd

Desain cover oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Di cetak dan diterbitkan oleh Jurusan PLS Fakultas Ilmu Pendidikan

Alamat Redaksi :
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Jl. Colombo Kampus Karangmalang Yogyakarta

Tlp/Fak : (0274) 586168 psw 369

E-mail : plsfiipuny@gmail.com

Web : <http://pls.fip.uny.ac.id/>

ISBN 978-602-99286-2-4



KATA PENGANTAR

Masyarakat sebagai suatu sistem memiliki beberapa komponen yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, dituntut akselerasi perubahan secara aktif dari anggota masyarakat. Ciri-ciri masyarakat aktif dan agen perubahan diarahkan pada upaya yang dapat menggerakkan masyarakat mencapai dalam kemajuan. Cara-cara yang harus dilakukan dan aktor-aktor yang berperan dalam pemberdayaan harus dioptimal. Tujuan pemberdayaan harus dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pada semua aspek. Analisis ini berangkat dari telaah peran komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Pemberdayaan masyarakat melibatkan modal sosial untuk memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menyatukan dan membantu mereka untuk saling berkomunikasi dengan cara efektif, efisien, produktif dan humanis yang dapat mengarah pada dialog yang sejati, pemahaman dan aksi sosial yang humanis dan harmonis.

Pada analisis ini disajikan diawali dengan modal sosial mengenai peran komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat, Komunikasi diharapkan dapat memprediksi, mendeteksi, menganalisis, dan menjelaskan setiap perubahan. Secara tidak langsung, komunikasi berpengaruh atas perubahan yang terjadi. Berbagai perubahan yang terjadi memerlukan dukungan dan intervensi komunikasi sehingga perubahan berlangsung seimbang dan bermanfaat. Untuk memperkuat peran modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan perannya dalam bentuk kelembagaan pada unit-unit usaha dan sosial. Kondisi ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerjasama, yang diwarnai oleh pola interelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan dan dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Perlunya penguatan unsur-unsur modal sosial dalam proses pemberdayaan seperti penguatan nilai atau norma-norma yang ada dalam institusi lembaga, peningkatan tindakan proaktif diarahkan dapat merangsang tumbuhnya sikap saling bertukar kebaikan (*resiprocity*) yang memperkuat jaringan yang terbentuk semakin kokoh dan membantu optimalisasi program pemberdayaan melalui penguatan komunikasi dan kelembagaan di masyarakat. Karakteristik perilaku masyarakat yang sangat beragam dan kompleks membutuhkan sentuhan modal sosial yang dapat membuat terjalinnya ikatan yang harmonis antar jaringan dalam pemberdayaan tersebut. Modal sosial dapat difahami adalah sebuah jalinan sosial yang memungkinkan masing-masing anggota dapat berhubungan langsung dengan kelompoknya

Agar pemberdayaan masyarakat lebih terarah dalam pencapaian tujuan yang optimal, maka perlu memberikan perhatian pada potensi dan kondisi yang dimiliki masyarakatnya sebagai wujud akomodasi dari perhatian pada kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal dapat dipahami sebagai ide-ide setempat yang bersifat bijaksana dan penuh kearifan, mengandung norma dan nilai baik yang masih dipertahankan karena merupakan suatu keyakinan untuk menjaga dan melestarikan alam. Hal itu masih tertanam dan masih dijaga oleh seluruh anggota masyarakatnya. Kondisi ini ditunjukkan pada masyarakat nelayan, masyarakat Dayak Kaburai Daerah Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya Kabupaten Melawi, dan sebagainya. Untuk memperkuat posisi pemberdayaan masyarakat di daerah diperlukan penguatan secara kelembagaan. Unsur penting yang sangat strategis adalah Pemerintah Daerah (PEMDA). Komitmen Pemda sebagai modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat di daerah/kota. Salah satu contoh bentuk komitmen Pemda dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemkot Salatiga dalam pembangunan pendidikan. Salah satu bentuk komitmennya adalah menjadikan Kota Salatiga sebagai kota pendidikan dan peningkatan perhatian Pemda terhadap pendidikan, misalnya berupa regulasi pembentukan dan penataan organisasi pendidikan yang sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi, dukungan pendanaan pendidikan, dan kebijakan-kebijakan lain yang menguntungkan perkembangan pendidikan. Merefleksikan apa yang dilakukan Pemda tersebut.

Agar pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara optimal diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen, karakter yang baik dan kepekaan sosial yang memadai. Manusia sebagai subjek pembangunan mengandung arti bahwa manusialah yang menjadi pemikir, perencana, dan pelaksana pembangunan dirinyan sendiri, pembangunan masyarakat. Mengembangkan manusia sebagai subjek pembangunan berarti mengembangkan manusia yang sadar akan permasalahan diri dan lingkungannya, manusia yang berusaha memecahkan sendiri permasalahan yang dihadapinya, manusia yang tidak selalu tergantung atau menggantungkan diri kepada orang lain untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, baik masalah sendiri maupun masalah masyarakat lingkungannya. Mengembangkan manusia yang demikian berarti mengembangkan manusia yang mandiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat tergantung kepada keberhasilan proses pemandirian manusia

Yogyakarta, 29 April 2013

Dr. Sujarwo, M.Pd

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
<hr/>	
Peran Komunikasi Pembangunan Dalam Pengembangan Masyarakat Di Negara Dunia Ketiga Restiawan Permana , Dosen Ilmu Komunikasi Universitas BSI Bandung	1
Peran Modal Sosial Dalam Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan Sari Narulita, SE, MSi , Dosen tetap STKIP PGRI Bandar Lampung	8
Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya Berbasis Kearifan Lokal Suku Dayak Kaburai Di Kalimantan Barat Dian Wahyuningsih	18
Komitmen Pemda Sebagai Modal Sosial Pembangunan Pendidikan (Sebuah Refleksi dalam Konteks Implementasi Paradigma Baru Pendidikan) Wasitohadi	32
Village Community Development Syafuruddin Wahid, Dosen PLS Universitas Negeri Padang	48
Partisipasi Orang Tua dalam Pendidikan (Suatu Studi Peningkatan Mutu Pendidikan di SMA Salatiga dan Semarang) Slameto . Dosen Program Studi PGSD FKIP UKSW Salatiga	59
Model Pemberdayaan Masyarakat Dusun Sukoharjo, Argodadi, Sedayu, Bantul, Yogyakarta Berbasis Modal Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Meita Wulan Sari , Mahasiswi Pendidikan Biologi UNY	72
Peranan Modal Sosial Dalam Menunjang Pengembangan Industri Kreatif Di Jawa Timur Herry Yulistiyono, M.Si , Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura .	81
Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Kebutuhan Belajar Irmawita, Dosen PLS FIP UNP	94
Revitalisasi Modal Sosial Dan Budaya Lembaga Pendidikan Masyarakat Dalam Membangun Habitus Baru S.Wisni Septiarti, M.Si , Dosen PLS FIP UNY	103
Pergeseran Pola Kehidupan Dan Kebutuhan Belajar Masyarakat Model Prismatik Hardika , Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UM	110
Pendidikan Dan Pengembangan Sosial (Peningkatan Intensitas Pengembangan Masyarakat Melalui Pendidikan Informal) M. Djauzi Moedzakir , Dosen PLS FIP Universitas Negeri Malang	119
Pembentukan <i>Civil Involvement</i> Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Habib Prastyo. S.Pd	127

Peranan Adat Istiadat dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Widyaningsih, M.Si Dosen Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY.....	132
Pemberdayaan Pemuda Melalui Social Capital Lutfi Wibawa, M.Pd Dosen Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY.....	137
Dampak pendidikan kewirausahaan masyarakat terhadap pengembangan modal social Entoh Tohani, M.Pd. Dosen PLS FIP UNY	143
Ketrampilan kerjasama sebagai modal social dalam pemberdayaan masyarakat Dr. Sujarwo, M.Pd Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY.....	149
Data Penulis	157

Membentuk Modal Sosial dalam Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)

Oleh:

Entoh Tohani, M.Pd

Dosen Jurusan PLS FIP UNY

Abstrak

Pendidikan kewirausahaan masyarakat atau PKM sebagai salah satu cara yang dipandang tepat untuk dapat mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yaitu menciptakan manusia yang kreatif, inovatif, dan produktif perlu diarahkan pada pembentukan modal sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keberhasilan pendidikan kewirausahaan masyarakat tidak lepas dan dipengaruhi oleh keberadaan dan keberfungsian modal sosial dalam penyelenggaraannya, namun terkadang modal sosial belum begitu diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan kewirausahaan masyarakat agar program ini memperoleh efektivitas yang lebih besar.

Kata kunci: Pendidikan, kewirausahaan, modal sosial

Pendahuluan

Setiap warga negara baik secara individual maupun berkelompok berkesempatan mendapatkan berbagai layanan pendidikan dan/atau pemberdayaan lain sehingga memungkinkan diri mereka menjadi individu atau kelompok yang kreatif, produktif, dan lebih berkarakter (Noeng Muhadjir, 2000). Melalui pendidikan, kesejahteraan hidup dan kehidupan warga masyarakat baik dalam bidang ekonomi, social budaya dan politik dapat tercapai. Dalam bidang ekonomi, pendidikan berfungsi untuk menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang kreatif, produktif dan mandiri, berperilaku inovatif, dan memiliki sikap dan nilai berwirausaha. Dalam bidang social budaya, melalui pendidikan setiap warga negara diharapkan menjadi manusia-manusia yang memiliki kepribadian utuh, berkarakter baik dan memiliki perilaku positif dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dalam kehidupan politik, melalui pendidikan, warga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam menyukseskan pembangunan bangsa, dan selalui melaksanakan dan menjaga perilaku demokratis, toleransi, dan kebersamaan dengan orang lain (Fegerlind & Saha, 1983).

Dalam kehidupan masyarakat, banyak peluang yang perlu dimafaatkan oleh setiap warga masyarakat, namun kadang peluang yang ada berupa melimpahnya potensi lokal seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kekayaan cultural belum dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu produk yang memiliki nilai tambah yang tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, setiap individu akhir-akhir ini dihadapkan pada perkembangan dunia semakin maju dengan ditandainya perubahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bentuk dari globalisasi yang tentunya dapat mendatangkan manfaat atau sebaliknya menghadirkan kerugian kepada kehidupan individu dan masyarakat. Adanya potensi dan tantangan tersebut, seorang perlu memiliki kompetensi yang tepat salah satunya adalah kapasitas kewirausahaan, dan tentu kompetensi ini dapat dicapai melalui proses pendidikan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

Kapasitas ini memungkinkan individu dapat mengatasi persoalan yang dihadapinya secara inovatif dari sudut pandang yang beragam. Pembentukan kapasitas kewirausahaan ini akhir-akhir ini sangat genjar dilaksanakan baik oleh pemerintah misalnya dengan program gerakan kewirausahaan nasional, swasta dengan kegiatan social responsibilitynya, lembaga pendidikan atau pun warga masyarakat secara perorangan yaitu melalui penyelenggaraan program pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKM).

Kewirausahaan

Konsep kewirausahaan sudah menjadi suatu hal yang dipandang penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena kewirausahaan mampu memberikan manfaat besar dalam perbaikan perekonomian masyarakat akhir-akhir ini. Tentunya sudah banyak para ahli memberikan pemaknaan terhadap konsep ini. Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan

keaktivitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha (Zimmer, dalam Kasmir, 2007:17). Kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahaan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain karena mereka memiliki kemampuan berinovasi (Drucker, 1984). Dengan kata lain, kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan usaha memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang beda dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi pada orang banyak.

Seorang yang memiliki kemampuan berwirausaha ditandai dengan sikap dan perilakunya yang dicirikan dengan karakteristik memiliki kepercayaan diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, memiliki kepemimpinan yang baik, memiliki keorisinilan dalam berfikir, dan memiliki perspektif ke masa depan, memiliki sikap kerja keras, bertanggungjawab atas semua aktivitas yang dilakukan, memiliki komitmen yang kuat dan teguh, dan mengembangkan hubungan yang baik dengan berbagai pihak baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha maupun yang tidak (Kasmir, 2007:27-28) serta mengorganisasikan mekanisme sosial/ekonomi untuk mengubah sumberdaya dengan cara praktis (Wiratmo, 1996:11).

Pada tataran substansi berwirausaha, seorang yang memiliki kemampuan berwirausaha adalah mereka yang 1) memiliki motivasi berprestasi tinggi, 2) memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam dunia usaha, dan 3) memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi peluang yang prospektif, menentukan peluang yang tepat dan layak untuk dicapai, merencanakan aktivitas berusaha, membangun jejaring social atau kemitraan baik secara institutional maupun personal, memulai kegiatan usaha dengan mencari sumberdaya yang diperlukan, memilih dan mengembangkan personalia secara selektif, melakukan promosi dan penjualan yang tepat, dan memperkirakan keuntungan dan kerugian yang dicapai (Kasmir, 2007). Pemikiran lain disampaikan oleh Boyless (2012) bahwa kompetensi kewirausahaan dapat mencapai kemampuan yang terkait dengan aspek kognitif: kemampuan seseorang melihat peluang; aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan yang baik dengan orang lain secara manusiawi, dan aspek tindakan yaitu kemampuan yang menunjukkan dirinya mampu mengelola usahanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya dengan kepercayaan diri dan penuh inisiatif.

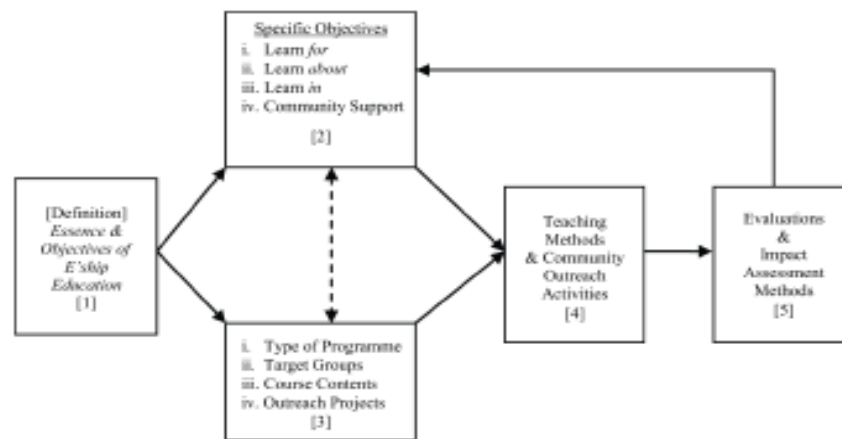
Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat

Individu atau kelompok menjadi wirausahawan bukan semata-mata dikarenakan oleh adanya sifat atau karakteristik bawaan yang ada dalam dirinya dan berlangsung secara alamiah, namun pembentukan kompetensi kewirausahaan dapat dilakukan melalui proses pendidikan atau *entrepreneurship education* yang terencana. Atau dengan kata lain, pembentukan kapasitas kewirausahaan perlu dilakukan dengan tindakan edukatif terstruktur dan terarah sehingga kapasitas kewirausahaan dapat dengan mudah diinternalisasikan oleh kelompok sasaran.

Dalam konteks memberdayakan masyarakat, pendidikan kewirausahaan memiliki kelompok sasaran yaitu para orang dewasa yang produktif dan memerlukan layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan kewirausahaan dimaknai sebagai proses edukatif yang bertujuan untuk memberikan kompetensi kewirausahaan masyarakat (keterampilan, pengetahuan, nilai-nilai) kepada anggota masyarakat yang umumnya orang dewasa dan dipandang produktif yang dapat digunakan untuk berwirausaha, bekerja bersama orang lain sehingga mereka dapat menghasilkan pendapatan, dan akhirnya mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Melalui pengelolaan pendidikan ini, beragam keterampilan kewirausahaan diajarkan kepada kelompok sasaran misalnya terkait dengan informasi dan teknologi komputer, kerajinan, pertanian, fashion, bidang perikanan, dll.

Pendidikan kewirausahaan pada dasarnya dimaksudkan oleh keinginan menyiapkan warga masyarakat untuk menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang penuh ketidakpastian, dan kebutuhan akan sumberdaya manusia yang dapat bekerja sesuai dengan situasi perubahan yang terjadi (Mwasalwiba, 2010). Mwasalwiba pun menjelaskan

proses pendidikan atau pembelajaran kewirausahaan mencakup: pendefinisian esensi dan tujuan pendidikan kewirausahaan, penentuan tujuan khusus kewirausahaan, penentuan program belajar, kelompok sasaran, materi dan tugas-tugas; penentuan metode pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Semua tahapan dalam pendidikan kewirausahaan masyarakat dimaksud sangat berhubungan satu dengan yang lain; perhatian yang perlu lebih jelas berikan dalam proses pembelajaran kewirausahaan masyarakat adalah aspek penentuan kelompok sasaran atau target group dalam hal ini warga masyarakat yang telah dewasa dan dipandang produktif, dan menghadapi masalah sosial tertentu. Kelompok sasaran perlu dipahami terlebih dahulu secara tepat agar apa yang akan diberikan berupa layanan pendidikan kewirausahaan tidak menjadi suatu yang dipandang sebagai pemborosan. Pemilihan kelompok sasaran harus didasarkan pada informasi yang benar bahwa mereka adalah orang-orang yang memang memiliki kebutuhan obyektif yang memerlukan layanan pendidikan kewirausahaan, memiliki kesadaran aktif bahwa dirinya akan berpartisipasi secara aktif dalam upaya peningkatkan kualitas dirinya, dan memiliki consensus yang kuat dalam mengikuiti proses pendidikan kewirausahaan. Oleh karena itu, pemilihan kelompok sasaran harus didasarkan pada pandangan bahwa individu-individu dalam mengatasi masalahnya dengan kemampuan sendiri, dan ditentukan oleh dirinya sendiri, sebagai makhluk yang memiliki kapasitas belajar.



Gambar: Model pendidikan kewirausahaan
(Sumber: Mwasalwiba, 2010).

Efektivitas Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat

Proses pendidikan kewirausahaan masyarakat diharapkan terlaksana secara efektif, yaitu terjadinya peningkatan kesejahteraan kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Dalam hal ini, kelompok sasaran harus mampu menjadikan hasil pembelajaran yang telah dicapainya menjadi bermakna bagi kehidupannya. Hasil pembelajaran yang dicapai bukan hanya sebagai sesuatu yang tidak berguna atau inert idea, namun diaplikasikan dalam bentuk kegiatan wirausaha yang produktif dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun secara kelompok, Kegiatan produktif harus mampu memberikan keuntungan materi dan ekonomi bagi mereka. Lebih jauh hasil penerapan hasil belajar perlu diarahkan pada pengembangan peran sosial yang positif kelompok sasaran dalam kehidupan masyarakatnya seperti bertindak sebagai pengembang masyarakat dan pendidik masyarakat, dan peningkatan kontribusi yang positif pada kehidupan politik khususnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah yang dihadapi bersama. Atau pendidikan kewirausahaan masyarakat perlu menghasilkan produktivitas, adaptabilitas, dan kontinuitasnya.

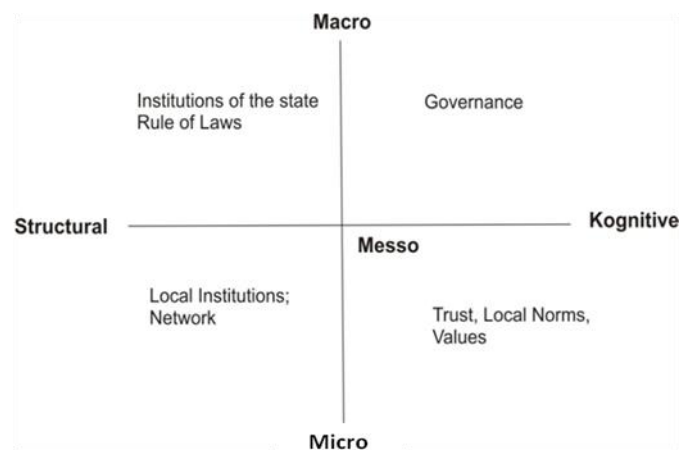
Dilihat dari aspek lain, pendidikan kewirausahaan yang berhasil atau efektif adalah memberikan umpan balik dan masukan, tentunya dicapai dengan melihat hasil evaluasi pendidikan ini, guna pengambilan keputusan untuk perbaikan kepada pihak penyelenggara pendidikan kewirausahaan masyarakat seperti para penyelenggara pendidikan kewirausahaan

masyarakat dalam rangka mengetahui kendala-kendala, perbaikan, dan/atau penghentian program pendidikan kewirausahaan; terhadap pendidik atau narasumber dalam rangka mengembangkan kemampuan melatih dan refleksi diri, dan bagi para donator atau pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi dalam menyukseskan proses pendidikan kewirausahaan.

Membentuk Modal Sosial

Istilah modal sosial sebenarnya muncul pada akhir abad 19, dan diperkenalkan pertama kali oleh Bourdieu yang menjelaskan mengenai konsep modal manusia, dan modal sosial. Konsep modal sosial selanjutnya dikembangkan lebih jauh oleh Coleman dan Robert Putnam (Field, 2005) yang mana Coleman dan Putnam lebih menekankan pada keberadaan modal sosial dalam konteks masyarakat /kolektif atau sebagai *public good* dibanding pemikiran Bourdieu yang lebih memandang modal capital sebagai asset pribadi (individual). Coleman menjelaskan bahwa *social capital is defined by its function. It is not a single entity, but a variety of different entities having two characteristics in common: They all consist of some aspect of social structure, and they facilitate certain actions of individuals who are within the structure* (Coleman, 1990:302). Modal sosial terdiri dari dua aspek yaitu: struktur sosial, dan tindakan individu-individu yang difasilitasi oleh struktur sosial dimaksud.

Secara lebih spesifik, modal sosial memiliki dimensi yang dapat dipahami secara lebih jelas sebagaimana pendapat dari Grootaert & Bastelaer (2002:243) yang menjelaskan bahwa modal sosial dapat berada pada level mikro, meso, maupun sosial dalam kehidupan sosial masyarakat, baik sifatnya structural misalnya kelembagaan suatu masyarakat, aturan perundangan, dan jejaring sosial yang terlembagakan maupun aspek cultural antara lain pengelolaan pemerintahan, norma dan nilai-nilai lokal.



Dilihat dari fungsinya, Woolcock (Field, 2005) menyatakan bahwa modal sosial dapat bersifat: mengikat (*bonding*) yaitu mampu mengikat dan menyatukan individu-individu yang ada dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat; menjembatani (*bridging*) yaitu mampu mengantarkan individu-individu yang ada dalam kelompok sosial berhubungan dengan anggota-anggota kelompok sosial lainnya yang lebih besar; dan menghubungkan (*linking*) yang mana menunjukkan bahwa modal sosial mampu menghubungkan suatu kelompok sosial dengan kelompok lain dan/atau kepada pihak yang berada di level atas dalam struktur hirarki tertentu.

Pendidikan kewirausahaan masyarakat baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, maupun perorangan diharapkan berkontribusi pada pembentukan modal sosial yang mampu mendukung keberhasilan usaha wirausaha kelompok sasaran. Hal ini disebabkan bahwa modal sosial yang positif atau produktif mampu menjadikan pengelolaan pendidikan kewirausahaan masyarakat menjadi lebih efektif, efisien, dan bermakna. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan kewirausahaan perlu diarahkan pada pembentukan modal sosial.

Pembentukan modal sosial dalam PKM dapat dilakukan pada tataran mikro, kelembagaan, dan lingkungan luas yang mempengaruhinya. Dalam setiap level atau lingkungan para pelaku atau actor baik actor yang terkait dengan usaha (*business stakeholders*) maupun pelaku yang masyarakat umum (*societal stakeholders*) dalam pendidikan

ini memiliki peran penting. Pada level mikro, pendidikan kewirausahaan harus diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman yang memungkinkan warga belajar mengkonstruksi pemahaman dan pengetahuan mengenai realitas atau dunia, melalui proses mengalami sesuatu dan merefleksikan pengalaman-pengalamannya. Warga belajar dapat merekonsialisasi pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, mungkin mengubah pengetahuan yang ada, atau mungkin menghilangkan apa yang sudah diyakini, atau menolak pengetahuan yang baru karena tidak relevan. Pembelajaran berbasis pengalaman dapat dilakukan misalnya dengan metode belajar dengan melakukan (*learning by doing*), belajar berbasis masalah (*problem based learning*), dan *learning based project*. Tentunya, pembelajaran secara berkelompok (kooperatif) harus dilakukan agar warga belajar dapat membangun rasa saling membantu dan mengembangkan budaya belajar dalam rangka menguasai kemampuan wirausaha.

Interaksi antara pendidik dan warga belajar selama proses pembelajaran harus menjamin terjadinya proses komunikasi yang harmonis, memosisikan warga belajar sebagai individu yang memiliki keinginan untuk saling membelajarkan dan seorang pendidik perlu menghindari perilaku yang kurang memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk melakukan proses belajar yang baik, didukung dengan komunikasi yang humanis. Prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa seperti: orang dewasa memiliki pengalaman dan orientasi belajar, perlu dipahami dan diaplikasikan dalam proses pendidikan kewirausahaan masyarakat sehingga terhindar dari praktek pendidikan yang hanya berorientasi pada pemilikan pengetahuan semata.

Pasca pendidikan kewirausahaan perlu dibangun suatu komunitas praktek (*community of practice*) yang berfungsi sebagai wahana untuk saling berbagi pengetahuan, membangun ikatan bersama sesuai dengan tujuan kelompok, dan membangun kemampuan untuk mengatasi masalah dan berhubungan dengan lingkungan luar kelompok, mengefektifkan usaha yang dikelola bersama dan berbagi sumberdaya (Holmes & Meyerhoff, 1999). Komunitas praktek bukan sebatas forum-forum untuk bertemu rutin mengurus hal-hal teknis, namun merupakan ruang dan kesempatan kepada semua pelaku usaha yang terkait untuk mengatasi permasalahan dalam memajukan masalah usaha misalnya masalah penjualan usaha, proses produksi barang/jasa, pengembangan pasar dan pengembangan kapasitas organisasi yang dilandasi prinsip saling membelajarkan dan belajar sepanjang hidup.

Kelembagaan pengelolaan pendidikan kewirausahaan idealnya dikembangkan suatu tata hubungan sosial antara pihak yang terlibat secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Dalam pengelolaan pendidikan kewirausahaan, terjamin suatu kondisi yang menunjukkan bahwa tidak adanya perlakuan-perlakuan yang tidak adil dalam pembelajaran kesempatan belajar kepada warga belajar, tidak mengutamakan mutu, dan ketertutupan informasi kepada para pihak yang terkait. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengelolaan pendidikan ini, pengembangan iklim organisasi/lembaga yang sehat, disertai dengan kepemimpinan yang tidak mengenal batas (*borderless*) dan *plate* harus diwujudkan sehingga semua pihak yang terlibat akan dapat membentuk rasa saling percaya dan merasa memiliki apa yang menjadi tujuan bersama dan memiliki perilaku yang positif.

Dalam konteks lingkungan luas, para pihak yang terlibat dalam pendidikan kewirausahaan masyarakat, khususnya warga belajar, dituntut untuk memiliki kemampuan bekerja sama, bersinergi dan berkoordinasi dengan para pihak yang ada di lingkungan luas. Hal ini disebabkan lingkungan luas memiliki pengaruh baik positif seperti banyak sumberdaya yang dapat dicapai, maupun pengaruh negative seperti persaingan yang tidak sehat; yang mana apabila salah melakukan tindakan antisipasi dan penyesuaian berakibat pada pencapaian tujuan pendidikan kurang optimal. Dalam hal ini, tindakan mengembangkan jejaring usaha dengan para *stakeholder* lain yang bersifat menguatkan kegiatan usaha dan keberadaan kelompok usaha dapat dilakukan dengan dilandasi nilai saling memberi keuntungan dan kontinu. Sudah pasti, pengembangan kemampuan berkomunikasi, bernegosiasi, dan memasarkan produk/lembaga kepada warga belajar menjadi suatu keharusan dalam pendidikan kewirausahaan masyarakat. Selain itu, fasilitas yang diberikan pemerintah baik pemerintah di level lokal maupun nasional merupakan suatu hal penting yang diperlukan dalam kesuksesan pendidikan kewirausahaan yang mampu memberikan kemajuan dalam aspek sosial masyarakat, misalnya adanya pemberian kemudahan perizinan, penyediaan informasi

kepada kelompok wirausaha, memberikan fasilitas (pendanaan, ruang usaha, tempat) yang memadai dan memberikan kepastian kestabilan lingkungan dalam berusaha.

Penutup

Pendidikan kewirausahaan masyarakat sebagai salah satu solusi memecahkan masalah masyarakat seperti pengangguran dan kemiskinan diharapkan dapat mencapai hasil yang baik, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan sosial masyarakat yaitu salah satunya terbentuk modal sosial yang menguatkan pengelolaan pendidikan kewirausahaan masyarakat. Terbentuknya modal sosial sosial dalam pendidikan kewirausahaan masyarakat dapat meningkatkan peningkatan produktivitas, efektivitas, dan akuntabilitasnya. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menunjukkan suatu gambaran bahwa hasil pendidikan kewirausahaan memberikan kemampuan pengetahuan, nilai dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan orang dewasa yang bermakna, atau dapat mencapai efikasi hasil pendidikan. Sudah pasti, modal sosial dalam penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan masyarakat yang terjalin dan terbentuk harus didasarkan pada kesadaran obyektif dan kemampuan dari semua para *stakeholder* dalam mengembangkan pendidikan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Coleman, James S. 1990. *Foundations of social theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Drucker, Peter F. (1984). *Innovation and entrepreneurship*. California: Perfect Bound.
- Field, John. (2005). *Social capital and life long learning*. Brisboll: The Policy Press
- Grootaert, Christiaan, & Thierry Van Bastelaer. 2002b. 'Introduction and Overview.' Pp. 1-7 in *The Role of Social Capital in Development*, edited by Thierry Van Bastelaer. Melbourne: Cambridge University Press.
- Holmes, Janet & Meyerhoff, Miriam. The Community of Practice: Theories and Methodologies in Language and Gender. *Language in Society*, Vol. 28, No. 2, (Jun., 1999), pp. 173-183.
- Kasmir. (2007). *Kewirausahaan*. Jakarta: Rajawali press.
- Mwasalwiba , Ernest Samwel. (2010). Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching methods, and impact indicators. *Education + Training*, Vol. 52 No. 1, 2010, pp. 20-47.
- Noeng Muhadjir. (2000). *Ilmu pendidikan dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Rake Sarakin.
- Masykur Wiratmo. (1996). *Pengantar kewirausahaan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.